

Hegemoni Negara Terhadap Dunia Pendidikan: Telaah Atas Teori Kritis Antonio Gramsci

Hafidz

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Jember

Abstrak

Sejatinya, pendidikan dibangun untuk mengembangkan pengetahuan manusia agar lepas dari keadaan tertindas dan hegemoni. Alih-alih mencapai target membentuk manusia otonom, kelangsungan dunia pendidikan di negara ini, terutama pada pemerintahan Orde Baru, justru selalu berada dan terjebak dalam dominasi negara. Dunia pendidikan selalu tidak dapat keluar dan bebas dari kepentingan negara. Maklum, keberadaan negara begitu dominan. Dominasi negara di setiap kelangsungan aktifitas warga bangsa, termasuk pendidikan, dalam bahasa Gramsci dikenal dengan sebutan hegemoni. Berpijak pada teori hegemoni Gramsci, secara gamblang tergambar betapa selama ini dunia pendidikan mengalami hegemoni negara yang berakibat pada hilangnya fungsi dasar pendidikan, yakni membebaskan manusia dari kondisi yang merongrong nilai-nilai kemanusiaannya.

Kata Kunci: *Hegemoni, Pendidikan, Teori Kritis, dan Gramsci*

Pengantar

Munculnya pemikiran kritis terhadap dunia pendidikan di penghujung abad 20, terutama di negara berkembang menandai bahwa perkembangan dunia pendidikan selama ini sudah keluar dari tujuan mulia didirikannya pendidikan. Dalam perspektif terminologi, pendidikan dipahami dalam dua hal pokok, pendidikan sebagai proses *transformasi knowledge* (pengetahuan) dan *transformasi values* (nilai-nilai).

Pengertian pertama, pendidikan didirikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia agar manusia mampu berkembang dan melakukan proses interaksi dengan lingkungannya lebih baik dan nyaman. Manusia mampu mengelola alam ini demi kebahagiaan dirinya. Pengertian kedua, bahwa proses pendidikan dipahami sebagai proses pengenalan dan pengetahuan manusia akan nilai-nilai yang berkembang dari kehidupan masyarakat yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Artinya masyarakat mendirikan pendidikan untuk kepentingan generasi berikutnya agar bisa mengembangkan diri, baik dari aspek pengetahuan maupun dari aspek nilai. Tidak mungkin masyarakat

mendidik generasi (anak-anak) berikutnya yang keluar dari bangunan nilai-nilai yang dibangun sebelumnya. Oleh sebab itu, acapkali ditemukan pandangan, bahwa pendidikan sebagai upaya pewarisan nilai-nilai.

Kalau kedua pengertian ini dipahami secara benar, maka sementara dapat disimpulkan, terdapat hubungan yang bersifat integrative dan saling mempengaruhi antara dunia pendidikan dan masyarakat (realitas sosial). Realitas sosial dan *outputnya* memberikan *input* bagi pengembangan pendidikan. Demikian sebaliknya, dunia pendidikan dan *outputnya* memberikan *input* bagi pengembangan realitas sosial dan masyarakat.

Mochtar Bukhori (1995: 13) menegaskan, *input* dan *output* tersebut bisa meliputi semua aspek kehidupan, baik dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, bahkan agama. Dari aspek politik, misalnya, ketika Indonesia baru merdeka dan potensi disintegrasi bangsa merupakan bahaya paling mengancam pada saat itu, maka diperlukan pengikat yang bisa mempersatukan semua komponen dengan sebuah ideologi. Sehingga, setelah melalui perdebatan panjang, kemudian lahir dan ditetapkanlah Pancasila sebagai ideologi yang kemudian wajib diajarkan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Hanya saja, pada kepemimpinan Orde Baru, pelajaran Pancasila yang diajarkan di seluruh lembaga pendidikan merupakan cara cukup efektif untuk memasukan gagasan-ide kepentingan penguasa. Pancasila hanya milik para penguasa, pihak lain tidak memiliki hak melakukan interpretasi terhadapnya. Sikap kritis terhadap kekuasaan yang muncul di kalangan intelektual dianggap tindakan menentang Pancasila. Hasil interpretasi penguasa terhadap Pancasila dipaksakan untuk diajarkan di seluruh lembaga pendidikan dan P4 menjadi syarat kegiatan awal di lembaga pendidikan. Program P4 24 jam, 45 jam, 100 jam dan lain-lain menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Ilustrasi di atas, memberi gambaran betapa realitas sosial memiliki andil cukup besar bagi pengembangan dunia pendidikan, di samping aspek lain, seperti ekonomi. Sebaliknya, hasil dari proses pendidikan berdampak secara signifikan terhadap pembentukan dan pengembangan realitas sosial.

Mempertegas gambaran di atas, Sanapiah Faisal (1999: 4) mengajukan teori *rekonstruksionalisme sosial* dalam menganalisis pendidikan yang berhubungan dengan masyarakat. Menurut perspektif ini, beberapa paradigma yang dikembangkan dalam dunia pendidikan selama ini adalah: *Pertama, Human Capital Theory*. Teori ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga sejak tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, peserta didik diajarkan bagaimana mereka mampu *survive* di sektor ekonomi.

Kedua, Modernisme Theory. Paradigma ini berorientasi pada perubahan mental, dari mental tradisional yang hanya bergantung kepada pola-pola keberpihakan alam dirubah kepada mental modern yang rasional dengan menempatkan alam sebagai objek yang bisa dikelola, dieksploitasi dan dimanfaatkan melalui pendekatan sains ilmiah. Paradigma ini merupakan kelanjutan dari paradigma *human capital theory*, sehingga pendidikan diarahkan pada perubahan mental sikap modern.

Ketiga, Equality Theory. Teori ini berangkat dari gagasan Karl Marx tentang persamaan kelas. Paradigma ini beranggapan bahwa realitas sosial yang dibangun oleh kelompok modern bersama industrinya telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Pola kehidupan masyarakat industri modern hanya menguntungkan kelompok pemilik modal, sementara kaum buruh yang tidak memiliki akses modal dalam kondisi teralienasi, sehingga peran-peran penting masyarakat didominasi kelompok pemodal. Karenanya, teori ini berorientasi pada pengembangan pendidikan yang diprioritaskan pada pembagian peran secara merata. Artinya, bagaimana *output* pendidikan tidak merasa asing dengan dunianya.

Keempat, Emansipation Theory. Teori ini merupakan kelanjutan gagasan Marx, yang meletakkan ketidakadilan sosial dan alienasi manusia sebagai titik tolak gagasannya. Teori ini kemudian dikenal sebagai praktek pembebasan dalam dunia pendidikan yang diusung oleh Paolo Freire. Dalam banyak tulisannya, terutama dalam buku "*Pendidikan Kaum tertindas*" dan "*Pendidikan sebagai sebuah praktek pembebasan*", ia mengangkat gagasan ketidakadilan sosial sebagai landasan berfikirnya, yang meletakkan oposisi biner antara kelas penindas dan kelas tertindas. Hanya saja, Freire tidak hanya mengkritisi persoalan perbedaan kelas, lebih dari itu, ia juga mendorong manusia terbebas sepenuhnya, otonom dan memiliki nilai kemanusiaannya. Dalam konteks dunia pendidikan, bagaimana manusia atau peserta didik menjadi subyek kreatif, bukan sebagai obyek seperti selama ini berlangsung

Gagasan pembebasan Freire dalam dunia pendidikan mendapatkan respon besar, terutama oleh organisasi non pemerintah yang ada di negara berkembang, termasuk Indonesia, lantaran kondisi pendidikan di negara berkembang benar-benar sudah sangat tidak membebaskan, menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan. Kondisi ini semakin *legitimate* ketika lembaga pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi, tidak lagi peka pada kehidupan real masyarakat, dan cenderung menjadi corong penguasa. Kondisi ini makin menempatkan posisi penguasa pada keadaan sangat kuat dan masyarakat pada posisi lemah.

Di Indonesia, keadaan ini begitu terasa terutama pada masa Orde Baru. Secara sistematis, dunia pendidikan dijauhkan dari kondisi real masyarakat. Dunia pendidikan seolah menjadi menara gading, terasing dan mengasingkan diri dari realitas masyarakat.

Selain sebagai akibat dari kebijakan politik, seperti kebijakan NKK-BKK, kondisi itu juga diakibatkan dari materi dalam kurikulum pendidikan tidak menyentuh kebutuhan real masyarakat. Selain itu, pola sentralistik dalam dunia pendidikan menjadi bukti pendukung lain dimana para penguasa telah melakukan dominasi dan penetrasi terhadap dunia pendidikan.

Dalam wacana keilmuan sosial, dominasi negara dalam seluruh sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan dikenal dengan sebutan "hegemoni". Sebagai sebuah landasan ktitik, teori hegemoni yang dikemukakan Antonio Gramsci dapat dijadikan sebagai paradigma dalam menganalisis kondisi pendidikan di Indonesia. Dalam tulisan ini, teori hegemoni Gramsci dijadikan landasan teori untuk membuktikan suatu tesa, bahwa relasi negara terhadap institusi pendidikan sebagai bentuk mempertahankan kekuasaan adalah fakta yang bisa dilihat.

Lebih Dekat dengan Sosok Gramsci

Antonio Gramsci lahir di Sardinia, Italia pada 22 Januari 1891. Secara fisik, ia kurang sempurna lantaran sejak lahir sudah membawa kecacatan fisik berpunggung bungkuk, sehingga ia tumbuh berkembang dengan tekanan psikologis, *introvert* dan paranoid pada penyangga tubuhnya. Ditambah lagi ia dibesarkan di keluarga kelas bawah, bahkan semakin buruk sisi ekonomi keluarganya, ketika pada tahun 1897 ayahnya dihukum atas tuduhan korupsi. Gramsci lahir sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara (Santoso dkk, 2003 :73).

Karena dibesarkan di keluarga miskin, maka pendidikan Gramsci berjalan sangat menyedihkan. Pada tahun 1903, Gramsci harus meninggalkan sekolah dan bekerja meninggalkan keluarganya. Dengan kelemahan fisik yang dipanggulnya dan kelemahan ekonomi yang harus dideritanya, tidak mengharuskan Gramsci menghentikan niat belajarnya untuk menjadi seorang filsuf besar di masa-masa berikutnya. Gramsci dengan susah payah masih tetap melanjutkan pendidikannya hingga masuk ke universitas.

Kesadaran tentang makna hidup, ditemuinya sejak ia mulai kuliah di Universitas Turin pada fakultas sastra dengan beasiswa yang pas-pasan. Di kampus ini, Gramsci mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh penting, baik dari kalangan akademisi maupun politisi. Ia kenal dekat dengan sejumlah professor seperti Matteo Bartoli, seorang sejarawan dan ahli linguistic, Luigi Einaudi, seorang ekonom dan juga Umberto Cosmo, seorang sastrawan. Gramsci juga berpetualang dalam pergolakan pemikiran intelektual Italia yang punya hubungan dekat dengan gerakan sosialis. Annibale Patore adalah tokoh sosialis yang memperkenalkan filsafat Marxisme dari pespektif Hegelian. Tokoh lain yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan pemikiran Gramsci adalah Rudolfo

Mondolfo dan Benedetto Croce. Dari Benedetto Croce, Gramsci mendapat pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Marx, karena Croce adalah orang yang berpengaruh terhadap pemikiran Marxisme di Italia. Mulai saat itu Gramsci mulai terbuka matanya menatap dunia. Konflik di Italia yang melahirkan Salatanisme dari kemelut kebijakan ekonomi di Turin pasca menyelesaikan studinya di universitas menjadikan Gramsci mengekspresikan rasa politiknya. Pada tahun 1931, untuk pertama kali berhubungan dengan gerakan sosialis di Turin. (Patria & Arief, 2003 : 47)

Pada tahun 1917, pasca terjadinya pemberontakan secara tiba-tiba di Turin oleh kaum pekerja dan mengakibatkan ditahannya sebagian besar pemimpin sosialis, untuk sementara Gramsci terpilih sebagai Komite sementara Partai Sosialis. Gerakan perlawanan itu terus berlanjut yang kemudian dikenal dengan gerakan dewan pabrik (Bellamy, 1990: 173-177). Untuk menguatkan gerakan dewan pabrik ini, pada tahun 1919 Gramsci mendirikan jurnal *L'Ordine Nuovo* yang memuat ide-ide politiknya sebagai persiapan revolusi. Hanya saja, pada tahun 1921, partai sosialis yang dipimpinnya pecah dan kemudian berdiri Partai Komunis Italia, dan Gramsci masih tetap terpilih sebagai pengurus. Di partai ini Gramsci berseberangan dengan sekretaris umumnya, Bordiga tentang konsep Fasisme. Bagi Gramsci Fasisme sangat berbahaya dan cenderung untuk berkuasa.

Fasisme Italia pada tahun 1926 telah memberangus semua kekuatan politik kiri, sehingga tepat pada tanggal 8 November 1926 Gramsci yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Partai Komunis Italia ditangkap dan dipenjara. Namun, di penjara inilah, Gramsci banyak meluangkan gagasan-gagasan besarnya, terutama menyangkut diskursus Marxisme dan meletakkan kerangka dasar dan perspektif baru dalam memahami dan menciptakan revolusi sosialis di Italia dan dunia modern lain. Sepuluh tahun setelah ia meninggal di penjara pada tanggal 27 April 1937, karya Gramsci diterbitkan. (Santoso dkk, 2003 : 75)

Melacak Akar Teori Hegemoni Gramsci

Kajian kritis dalam dunia modern saat ini sangat sulit dilepaskan dari sosok Karl Marx, terutama kritik terhadap sistem ekonomi kapitalistik. Sosok dan gagasan Marx telah memberi andil bagi hadirnya perlawanan dan gerakan revolusi di beberapa belahan dunia. Berbeda dengan kebanyakan filsuf yang berkulat dalam alam ide, Marx mengarahkan pemikiran filosofisnya bergerak ke arah praksis, sehingga tidak salah jika kemudian gagasan Marx bukanlah semata kajian ilmiah tetapi bergerak menjadi ideologi politik.

Walau belakangan gerakan ideologi marxis sudah kehilangan taringnya, tetapi gagasan kritisnya terwariskan kepada generasi filsuf berikutnya. Frans Magnis Suseno

(2001: 3-4) mengungkapkan pemikiran Karl Marx bukan hanya menjadi inspirasi dasar bagi perjuangan kaum buruh atau menjadi inti dalam ideologi komunis, tetapi juga menjadi salah satu rangsangan besar bagi perkembangan sosiologi, ilmu ekonomi dan filsafat kritis yang menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat abad ke-20.

Salah satu penerus gagasan Marxis adalah Gramsci. Sebagai penerus ajaran Marxis, ia berbeda dengan pengikut Marx lain seperti Lenin, Stalin dan Lucas yang cenderung membenarkan gerakan fasisme. Gramsci cukup idealis dengan analisa-analisa gerakan politik yang cenderung membebaskan. Banyak kalangan berpendapat Gramsci adalah intelektual besar pasca Marx. Walaupun banyak gagasan lain bermunculan menghiasi literature Marxian, namun Gramsci dianggap pilar terpenting, bahkan ia disebut sebagai Marxis Barat. Sebutan ini mengiringi Gramsci, karena keberhasilannya merevisi gagasan-gagasan Marxisme klasik.

Menurut Roger Simon (2004:35-36) gagasan politik Gramsci bisa dilacak akar sejarahnya dalam perdebatan panjang tentang kekuasaan negara sejak zaman Yunani Kuno, dan meruncing pada konstruksi Marx tentang masyarakat dan pendekatan dialektika materialisme historis. Secara konseptual Gramsci turut terpanggil untuk mengkritisi dan menawarkan solusi atas kebuntuan praksis materialisme historis Marx yang deterministik mekanik. Gramsci merekonstruksi pemikiran Marx dan penerusnya terutama dalam dua titik utama: paham ekonomisme dan pahan kekuasaan negara.

Sebenarnya konsep tentang kekuasaan negara telah lama diperdebatkan sejak masa Yunani Kuno. Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa negara membutuhkan kekuasaan mutlak untuk mendidik moral rasional para warganya. Pada masa pertengahan, menurut Arief Budiman (1996 : 7) ide tersebut mengalami rekonstruksi dalam batas kekuasaan teologis Gereja. Negara dianggap sebagai wakil gereja di dunia dan wakil Tuhan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia.

Pada masa Renaissance, muncul para filsuf liberal, seperti Thomas Hobbes, Locke, Rosseau yang melakukan kritik terhadap kekuasaan negara yang didominasi kaum gereja. Mereka lalu menawarkan model negara yang menjamin otonomi manusia, bebas tanpa belenggu dari luar dirinya. Sehingga pada saat itu lahirlah gagasan bahwa negara merupakan representasi dari masyarakat, wakil dari kepentingan umum. Pendapat tentang kekuasaan negara ini diperkuat lagi oleh Hegel melalui konsep dialektikanya. Hegel berpandangan bahwa negara adalah ungkapan roh objektif yang merupakan cerminan dari kehendak, pikiran dan hasrat masing-masing individu (Suseno, 1992: 100).

Berdasar pada gagasan negara liberal ini, maka kapitalisme yang memposisikan individu berhak memperoleh ekonomi sebesar-besarnya menjadi semakin berkembang luas. Pada perkembangan selanjutnya praktek kapitalisme mendapat legitimasi negara. Dalam suasana ekonomi politik kapitalis seperti itu, Karl Marx melakukan kritik terhadap realitas kapitalisme. Berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya yang hanya menolak

realisasi negara yang mengekang kebebasan individu, Marx berpandangan eksistensi negara industri diakibatkan oleh adanya ketidak beresan yang prinsip dalam kehidupan masyarakat. Menurut Marx, realitasnya negara hanya memberikan kebebasan kepada segelintir orang, dan tidak mengabdikan kepada seluruh masyarakat, negara hanya melayani kepentingan kelas-kelas tertentu dan menjadi alat kelas dominan (Suseno, 1991: 259).

Pandangan Marx seperti itu merupakan hasil pandangan filsafatnya tentang masyarakat dan sejarah, yang dikenal dengan *materealisme historis*. Pokok pandangan ini bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh hubungan produksi. Dengan demikian, ekonomi merupakan basis bagi masyarakat (*basis struktur*), sedangkan institusi sosial, negara dan kesadaran sosial merupakan bangunan atas (*supra struktur*). Pendekatan ini menurut Sindunata (1983:54) dikenal dengan *determinisme ekonomis* yang disebut pandangan marxisme klasik dalam ungkapan "*bukan kesadaran yang menentukan eksistensi sosial, tetapi eksistensi sosial yang menentukan kesadaran*".

Ada beberapa dasar teoritis yang digunakan Marx tentang negara. *Pertama*, Marx memandang kondisi material dari masyarakat sebagai basis struktur sosial dan kesadaran manusia. Maka bentuk Negara pun muncul dari hubungan-hubungan produksi, dan bukan dari perkembangan ide atau keinginan manusia untuk berkollektif. Pandangan ini merupakan kritik terhadap gagasan Hegel yang melihat negara sebagai sesuatu yang abadi, tak punya konteks dengan sejarah, dan meletakkan masyarakat sebagai kolektivitas yang ideal. *Kedua*, negara merupakan eksperesi politik dari struktur kelas yang melekat pada produksi. *Ketiga*, negara bukan merupakan kesepakatan masyarakat, karena negara dalam masyarakat borjuis merupakan senjata paling ampuh bagi masyarakat borjuis (Canoy, 1984: 46-47).

Gagasan Marx yang hanya menempatkan ekonomi sebagai basis bagi pengembangan masyarakat dan negara diteruskan penerusnya dengan membangun diskursus kritis dalam menganalisa negara dan masyarakat. Fokus perhatian para intelektual ini dikenal dengan kiri baru (*new left*) yang menekankan pendekatan ideologis tentang negara industri maju yang mampu bertahan sekaligus sebagai legitimasi kelompok borjuis. Perdebatan ini juga melahirkan kesangsian terhadap ajaran Marxisme klasik yaitu kesadaran manusia merupakan hasil dari kondisi material objektif (hubungan produksi). Sedangkan pada gagasan yang lain Marx juga menganjurkan perjuangan kelas untuk merobohkan kapitalisme. Artinya, bahwa Marx juga menggunakan subjektifitas. Pada konteks inilah, Gramsci mengambil posisi. Salah satu gagasan Gramsci yang cukup dominan adalah pandangannya mengenai hegemoni, sebuah pandangan yang cukup orisinal, ide sentral dalam perkembangan teori sosial (Patria & Arief, 2003: 5).

Konsep Hegemoni Gramsci berlatar dari kegagalan kelompok sosialis dan komunis di Italia dan membuahkan kemenangan bagi kelompok Fasisme Musollini.

Fasisme adalah gerakan politik yang didirikan oleh pemimpin sosialis, Benito Mussolini (1883-1945), yang keluar dari partainya pada permulaan perang Dunia I, karena Mussolini menuntut agar Italia terlibat perang dan berpihak pada sekutu, sedangkan Partai Sosialis tidak setuju untuk terlibat perang. Pasca perang, Mussolini membentuk Fasci di Combattimento atau kelompok tempur untuk melindungi veteran perang dan melawan usaha "*anti patriotic*" dari kelompok ekstrem kiri. Fasci inilah yang kemudian menjadi istilah Fasisme, yang membuat Mussolini berusaha mencegah revolusi komunis dan sebagai obat bagi kelumpuhan partai-partai moderat. Maka pada Oktober 1922, yang dikenal dengan "*March on Rome*", Mussolini ditunjuk sebagai perdana Menteri dalam suatu kudeta yang legal (Hogopian, 1985: 212).

Kondisi ini lalu melahirkan gagasan alternatif Maxxis tentang negara yaitu suatu kesatuan yang kompleks dari kegiatan teori dan praktek, yang dengannya kelas yang berkuasa tidak cuma membenarkan dan memelihara dominasinya, tetapi mengatur untuk memenangkan konsensus aktif yang diatur (Gramsci, 1976 :244).

Pemikiran seperti itu belajar dari pengalaman revolusi Italia yang gagal, dimana Fasisme Mussolini memperoleh dukungan politik massa kelompok Marxian: terutama buruh dan petani, karena propaganda dan hegemoninya. Artinya, kelompok Marxian yang hanya menekankan pada sentimen ekonomi sebagai variabel penting, dan melupakan kekuatan tradisi, budaya, bahkan institusi sosial sebagai supra struktur telah gagal meraih kekuasaan.

Fakta lain yang memperkuat gagasan hegemoni Gramsci adalah revolusi yang terjadi di Rusia dan berhasil menghapus pertentangan kelas, belum tentu cocok dipraktikkan di negara lain di belahan Benua Eropa, karena menurut Gramsci kelompok Borjuis Inggris dan Perancis telah cukup sukses menjalankan hegemoninya untuk meredakan gejolak masyarakat bawah. Bagi Gramsci, untuk melakukan perubahan sosial, tidak cukup hanya mengandalkan sentimen ekonomi. Revolusi yang didasari sentimen ekonomi semata akan mendorong masyarakat buruh untuk menuntut haknya memperoleh ekonomi dan merebut semua alat-alat produksi. Sehingga, hal ini akan mendorong lahirnya penindasan baru bagi kelompok lain. Contoh paling nyata adalah Revolusi Bolshevik di Rusia yang menempatkan buruh dan petani memimpin negara.

Dalam konteks perubahan sosial, Gramsci masih percaya revolusi sebagai salah satu cara untuk menciptakan perubahan sosial, dengan catatan akomodatif kepada semua kepentingan. Proses akomodatif merupakan gagasan penting dari Gramsci, sebab untuk membangun masyarakat sosialis perlu dukungan semua kelompok kepentingan. Oleh sebab itu hegemoni menurut Gramsci adalah kemampuan untuk mengakomodasikan semua kepentingan kelompok lain sehingga mereka mampu memberikan dukungan. Dengan cara ini kekuasaan dapat diraih dan dipertahankan (Haramain dkk, 2001 : 61).

Makna Hegemoni dalam Filsafat Gramsci

Istilah Hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno, "*Eugemonia*" diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim negara kota secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto, 1993: 73). Namun, sejak abad ke-19 hegemoni memperoleh makna baru. Pengertiannya menjadi lebih sering merujuk pada situasi tertentu pada saat terjadinya dominasi politik dari negara kuat ke negara lemah yang biasa juga disebut dengan istilah *imperialisme* (Williams, 1983: 144).

Konsep Hegemoni secara historis pertama kali di produksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang Marxis Rusia, Plekanov. Konsep ini dibangun sebagai bagian dari strategi menjatuhkan kekuasaan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu pada pengertian kepemimpinan *hegemonic proletariat* serta perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan kelompok lain seperti: kaum borjuis, petani dan intelektual yang berkeinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar (Bocock, 1986: 24).

Dari gagasan inilah, lalu Lenin mengusung gagasannya tentang perlunya kepemimpinan dan perjuangan politiknya. Lenin menganggap perlu ada kesadaran yang bersifat politis; perlu diajarkan kepada segenap pekerja akan pentingnya kepemimpinan yang diaktualisasikan dalam bentuk partai. Konsep hegemoni Lenin lebih banyak menekankan pada persoalan kepemimpinan.

Konsep hegemoni Lenin ini menjadi pijakan bagi Gramsci dalam membangun gagasan hegemoninya. Gramsci menggambarkan tentang basis dari supremasi kelas, yaitu dominasi dan kepemimpinan intelektual - moral. Dengan cara ini kekuasaan dapat diraih, dominasi dapat menghancurkan musuh dan kelompok oposisi, sedangkan kepemimpinan digunakan untuk memimpin kelompok sekutu. Kepemimpinan merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kekuasaan (Gramsci, 1976:57-58). Hubungan dua momen ini sangat penting bagi pemikiran Gramsci. Bagi Gramsci kelas social akan memperoleh supremasi melalui dua cara, dominasi dan kepemimpinan intelektual dan moral. Cara kedua inilah yang kemudian disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni.

Lebih detail soal hegemoni ini, Gramsci menjelaskan setiap negara di mana pun akan berhadapan dengan dua kelompok kepentingan; bangsawan yang ingin memerintah dan rakyat yang tidak ingin diperintah. Lalu bagaimana seorang Raja atau presiden menjalankan pemerintahannya? Jawabannya, sang Raja dan Presiden jika ingin memerintah secara efektif, harus mampu meminimalisir resistensi masyarakat, dan pada saat yang sama menciptakan ketaatan yang spontan dari yang memerintah. Secara singkat Gramsci mengatakan "bagaimana caranya menciptakan hegemoni" (Gramsci,

1976: 144).

Dengan demikian konsep hegemoni Gramsci selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator. Pandangan ini beranggapan dari pengertian tentang situasi sosial politik dengan istilah momen, di mana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan. Pengaruhnya membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip hidup dan relasi sosial (Williams, 1960: 587).

Proses pembentukan dan perkembangan hegemoni tergantung pada sebuah consensus, kesepakatan seolah-olah yang dibangun masyarakat, karena kepandaian dan kecerdasan kelompok dominan mengelabui dan membohongi masyarakat. Paling tidak ada dua biang keladi yang menyebabkan konsensus menurut Gramsci, pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Bagi Gramsci, pendidikan yang ada, tidak pernah menyediakan kemungkinan membangun kemampuan untuk berfikir secara kritis dan sistematis bagi masyarakat bawah. Sementara, mekanisme kelembagaan seperti sekolah, gereja, partai politik, media massa dan lain sebagainya menjadi tangan-tangan kelompok yang berkuasa untuk mendukung ideologi yang mendominasi. Sehingga sampai di sini Gramsci berkesimpulan bahwa watak konsensus masyarakat kapitalis sebagai kesadaran yang bertentangan (Hendarto, 1993: 82-84).

Dari pengertian hegemoni yang dibangun Gramsci, hegemoni tidak lagi hanya dipahami satu dominasi politik dalam relasi antar negeri, akan tetapi juga merupakan dominasi politik dari suatu kelas kuat terhadap kelas lemah dalam relasi antar kelas. Bahkan, lebih dari sekedar dominasi politik, hegemoni juga berarti dominasi yang lebih luas, seperti pandangan hidup, kebudayaan, ideologi, pengetahuan (Latif & Ibrahim, 1996 :28).

Realitas Hegemoni Negara terhadap Dunia Pendidikan

Awal tahun 1980-an, pada masa Orde Baru di Indonesia, ada kecenderungan baru dari kelompok-kelompok masyarakat, yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Kritik itu lahir lantaran terlalu dominannya kekuasaan dan menjadikan masyarakat sipil menjadi lemah dan tidak berdaya. Realitas kebijakan politik yang menonjol adalah eksistensi partai politik yang tidak lagi menyuarakan kepentingan masyarakat, tetapi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Massa mengambang adalah fakta lain dalam meredam masyarakat terlibat secara politik praksis.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah persoalan ketidak-adilan sosial ekonomi. Ketimpangan yang terlalu jauh dalam aspek ekonomi antara kelompok miskin mayoritas dan kaya minoritas. Bangunan sistem kapitalis yang diusung pemerintah semakin

membuat masyarakat bawah tidak berdaya. Persoalan kesempatan kerja, pengangguran, kebodohan akibat tidak bisa mengenyam pendidikan adalah masalah krusial yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Puncaknya adalah krisis moneter yang kemudian mengarah pada krisis ekonomi menguncang negeri ini pada tahun 1997, hingga kini kondisi ini belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ini kemudian memunculkan kelompok intelektual kritis, bahkan terdapat kelompok intelektual yang tidak lagi percaya kepada kekuasaan negara. Mereka memosisikan diri sebagai kelompok oposisi kritis pada pemerintah. Sikap kritis mereka tunjukkan dengan melakukan *counter* opini dan mencari cara lain yang lebih strategis untuk melakukan proses perubahan. Anehnya, kekuasaan dengan logikanya sendiri merasa terancam posisinya dan melakukan pemberangusan sikap kritis ini dengan cara represif maupun dengan cara propaganda ide, membangun opini. Praktek kekuasaan seperti ini mendapat legitimasinya dalam konsep hegemoni Gramsci. Analisa hegemoni Gramsci ini juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana penguasa meminta legitimasinya dari kelompok intelektual lain. Maka pada saat yang sama kelompok intelektual terbagi dalam dua mainstream besar; kelompok oposisi dan kelompok pro kekuasaan.

Suasana keterlibatan atau peran intelektual dalam kekuasaan menjadi diskursus panjang dalam sejarah pemikiran Indonesia. Mengutip pendapat Julian Benda, seorang intelektual tidak boleh menjadi pendukung kekuasaan yang fasis dan otoriter. Debat terbuka di media massa, tentang hubungan intelektual dan kekuasaan menjadi bagian dari perkembangan pemikiran tentang perubahan sosial, dengan sudut pandang masing-masing. Gagasan tentang peran intelektual sangat sulit dilepaskan dari akar historis pemikiran Gramsci. Anehnya, diskursus tentang peran intelektual ini, semakin terpolarisasi dalam dua gejala kondisi kelompok intelektual, yang secara praktis bisa dilihat bentuknya; yaitu kelompok intelektual pro kekuasaan dan kontra kekuasaan yang berjalan hingga runtuhnya rezim orde baru.

Kelompok kontra kekuasaan menilai bahwa dominasi atau hegemoni kekuasaan negara amat dominan yang membuat perubahan sosial sangat sulit terjadi. Kondisi dipahami secara seksama oleh kelompok pertama ini. Hingga sampailah mereka pada kesimpulan, bahwa penguatan masyarakat menjadi kunci utama untuk keluar dari kondisi ini. Penguatan masyarakat menjadi penting dilakukan mengingat mereka dalam kondisi lemah dan dilemahkan negara. Ketidak berdayaan masyarakat inilah sebagai penyebab mendasar atas tidak terciptanya perubahan-perubahan sosial. Kondisi seperti ini melahirkan lembaga non pemerintah yang populer dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibentuk oleh sejumlah intelektual kritis. Semenjak awal tahun 1980-an hingga saat ini LSM tumbuh subur di negeri ini.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat inilah, posisi dunia pendidikan memainkan peran penting, sebab pendidikan dipahami sebagai sarana paling efektif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dalam perjalanannya, pendidikan yang awal mula didirikan untuk memberdayakan manusia dan masyarakat, justru mengarah sebaliknya, pendidikan sebagai sarana untuk melakukan proses pembodohan masyarakat. Kritik Paolo Freire tentang pendidikan di negara berkembang, termasuk di Indonesia yaitu pendidikan yang jauh dari realitas, pendidikan yang tidak membebaskan, pendidikan yang menganggap manusia sebagai objek, pendidikan yang tidak mengembangkan potensi kreatif, dan lembaga pendidikan yang menjadi kepanjangan tangan penguasa adalah fakta yang nyata bahwa dunia pendidikan sudah kena racun, virus dan hegemoni kekuasaan.

Kondisi dominasi kekuasaan otoriter berakhir pada tahun 1998 dengan gelombang reformasi. Harapan besar dibangun dalam benak masyarakat Indonesia bahwa perubahan mendasar akan terjadi. Namun harapan itu hanyalah harapan kosong. Sekalipun kekuasaan otoriter dan hegemonik telah tumbang dan diganti dengan penguasa-penguasa baru, kondisi masyarakat belum sepenuhnya terberdayakan, baik secara sosial dan ekonomi. Bahkan, kondisi pendidikan yang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat miskin tidak pernah benar-benar terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan orde baru mampu membangun dan menciptakan hegemoninya di seluruh sektor kehidupan. Artinya, logika kekuasaan benar-benar ditanamkan ke dalam alam sadar masyarakat, bahwa logika kekuasaan harusnya seperti itu dan tidak menjadi corong kepentingan masyarakat, terutama masyarakat bawah. Sialnya, kondisi ini seolah-olah mendapat pengakuan semacam konsensus – atau hegemoni dalam pemikiran Gramsci - yang diterima oleh masyarakat.

Intelektual sebagai Organizer Hegemoni

Pandangan lain dari gagasan Gramsci yang cukup menarik adalah pandangannya tentang peran kaum intelektual. Dalam tulisannya "*the southern question*", Gramsci menganalisa cara suatu aturan politik dan hegemoni kelas, yang secara nyata dapat diaktualisasikan dan diorganisir. Gramsci memandang persoalan peran intelektual sebagai bagian pola untuk memahami hubungan antara basis struktur dan supra struktur. Intelektual berperan untuk mengambil posisi dalam wilayah-wilayah realitas sosial.

Analisis Gramsci tentang intelektual ini, bertujuan untuk menolak mistifikasi intelektual yang dipahami oleh para filsuf-filsuf idealis, seperti Plato, Aristoteles maupun Hegel. Plato dan Aristoteles, misalnya, mengungkapkan bahwa fungsi negara adalah untuk mendidik moral warganya. Untuk menjamin tegaknya moral, maka negara harus dipimpin oleh intelektual, dalam hal ini filsuf. Filsuf dapat membedakan mana yang baik dan Buruk. Selanjutnya Plato menurut Schmid (1965: 17-18) berpandangan

bahwa aristokrasi para intelektual akan memimpin suatu kesatuan organisasi kejiwaan yang dipimpin oleh pikiran keadilan.

Dalam pandangan idealis ini, bagi Gramsci intelektual dianggap berbeda dan muncul di luar hubungan-hubungan produksi. Akan tetapi Gramsci juga melawan pemahaman yang beku dari kelompok sosialis yang selalu berdasar atas penafsiran ekonomistik atas peran-peran sosial politik kaum intelektual (Sasson, 1987: 135).

Karenanya, ketika mendedah peran yang mestinya diusung kaum intelektual, Gramsci berpandangan bahwa posisi intelektual diperoleh bukan dari kegiatan-kegiatan intelektualnya, melainkan posisi kegiatan intelektual yang menempati dalam sebuah hubungan-hubungan sosial yang kompleks. (Gramsci, 1976:8). Selanjutnya Gramsci menjelaskan bahwa seorang buruh tidak berarti bukan kalangan intelektual, karena buruh terlibat dalam kegiatan manual. Buruh tetap seorang intelektual karena memiliki kerja mental dalam hubungan sosial tertentu. Demikian juga kelompok kapitalis, secara personal dapat saja membawa fungsi intelektual. Dalam pengertian ini Gramsci mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi intelektual, akan tetapi tidak semua orang punya fungsi intelektual dalam masyarakat (Gramsci, 1976 : 9).

Posisi dan peran intelektual yang diinginkan Gramsci adalah fungsi organisasional yang kompleks, baik di wilayah masyarakat sipil maupun negara. Kompleksitas ini hanya dapat didekati lewat analisis multi dimensional. Oleh sebab itu, kemudian Gramsci membagi intelektual dalam dua tipe: intelektual organik dan intelektual tradisional. Intelektual organik berhubungan langsung dengan cara produksi yang dominan. Ada beberapa kategori yang dapat digunakan untuk menyebutkan intelektual organik. *Pertama*, mereka menciptakan suatu kelas baru dan mengembangkan diri. *Kedua*, mereka memiliki pengaruh dan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan fungsinya yang tidak hanya urusan ekonomi, tetapi juga lapangan sosial politik. (Gramsci, 1976 : 5) Oleh sebab itu kelompok intelektual organik, baik dari kalangan buruh maupun borjuis harus melakukan proses penyadaran dengan melakukan penetrasi kepada massa. (Bellamy, 1990 : 199) Sedangkan untuk intelektual tradisional adalah kelompok otonom dan independen. Kelompok ini memisahkan diri dari tatanan borjuis. Kelompok ini menyanggah tugas-tugas dari kepemimpinan intelektual yang diberi (*given*) oleh masyarakatnya. Mereka ini kelompok rohaniawan, penulis, filsuf dan artis. (Patria & Arif, 2003 : 163)

Penutup

Gagasan Gramsci tentang hegemoni telah memberikan wawasan baru bagi pengembangan teori-teori sosial kritis. Bahwa segala perubahan sosial bisa dilakukan dalam ragam perspektif. Secara historis, gagasan Gramsci memiliki akar sejarah kuat dengan perkembangan pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh filsuf-filsuf

sebelumnya.

Konsepsi hegemoni, yang sangat berkaitan dengan kekuasaan negara telah dibicarakan oleh para filsuf Yunani; Plato dan Aristoteles, hingga mengalami rekonstruksi pada masa Renaissance dengan munculnya filsuf; Thomas Hobes, Locke dan Rosseau. Gagasan mereka diperkuat lagi oleh Hegel dengan dialektikanya. Filsuf-filsuf ini mendapat kritik oleh filsuf berikutnya Karl Marx dengan dialektika material historisnya. Dalam konteks demikian inilah, Gramsci hadir dengan melakukan revisi gagasan Marx yang tidak lagi relevan untuk proses perubahan sosial.

Oleh sebab itu, meletakkan analisa Gramsci tentang hegemoni dalam konteks melakukan perubahan sosial di Indonesia menjadi relevan, ketika fakta sejarah menunjukkan bahwa proses reformasi tahun 1999 masih tetap menempatkan kelompok kapitalis berkuasa, sedangkan kelompok proletar tetap dalam kondisi terhegemoni.

Daftar Pustaka

- Bocock, Robert. 1986. *Hegemoni*. London: Tavistock Publication
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.
- Bukhori, Mochtar. 1995. *Pendidikan dan Pembangunan*. Bandung: Mizan.
- Canoy, Martin. 1984. *The State and Political Theory*. New Jersey: Princeton University Press.
- Faisal, Sanapiah. 1999. *Pendidikan Luar Sekolah; Sebuah Model Pendidikan Paulo Freire*. Malang: Sebuah Makalah.
- Freire, Paulo. 1994. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta : LP3ES
- , 1995. *Pendidikan Sebagai Sebuah Praktek Pembebasan*. Jakarta: LP3ES
- Gramsci, Antonio. 1976. *Selection From The Prison Notebooks*. New York: International Publisher.